

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

BRI telah melakukan kerjasama program pemerintah berupa Penyaluran dana bantuan social (bansos) dalam program keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), akuisisi BUMDES dan Dana Desa Selindo, pemberian kartu tani dan akuisisi Kios Pupuk Lengkap (KPL), penyaluran dana program Indonesia pintar (PIP).

Bank BRI terus fokus memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta tetap menjaga kepemimpinan untuk pangsa pasar bisnis mikro. Bank BRI melakukan transformasi dengan terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku UMKM agar dapat “naik kelas” melalui akses pembiayaan, digitalisasi dan inklusi keuangan. Digitalisasi UMKM dilakukan dengan terus mengembangkan platform digital seperti Indonesia Mall. Layanan ini mendorong pemasaran produk-produk mitra binaan UMKM BRI dari seluruh Indonesia untuk go online.

Digitalisasi UMKM merupakan bagian dari terobosan BRI dalam mengembangkan digital banking melalui penerapan 6 pilar, yaitu *New Way of Working*, *Fintech Partnership*, *Mobile First Strategy*, *Open API*, *ChatBot* dan *Innovation Ecosystem*. Digitalisasi di Bank BRI didukung dengan teknologi satelit, dimana BRI merupakan satu-satunya bank di dunia yang memiliki dan mengoperasikan satelit sendiri, yaitu BRIsat. Dengan dukungan jaringan yang

disediakan oleh satelit BRI^{sat}, Bank BRI hadir di seluruh penjuru negeri, tidak terkecuali di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Keberadaan BRI di remote area bertujuan Digitalisasi UMKM merupakan bagian dari terobosan BRI dalam mengembangkan digital banking melalui penerapan 6 pilar, yaitu *New Way of Working*, *Fintech Partnership*, *Mobile First Strategy*, *Open API*, *ChatBot* dan *Innovation Ecosystem*, Laporan tahunan BRI (2017).

Untuk menyediakan akses keuangan yang terintegrasi dengan kualitas yang sama seperti di wilayah perkotaan. Terbukanya akses perbankan yang terintegrasi bagi masyarakat di remote area merupakan komitmen BRI dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Bank BRI juga terus melakukan penetrasi dan perluasan inklusi keuangan dengan pengembangan agen LAKU PANDAI yang dinamakan agen BRILink. Hingga akhir tahun 2017, BRI memiliki 279.750 agen BRILink yang mampu mencetak transaksi senilai Rp. 298 Triliun di sepanjang tahun 2017. Selain itu, BRI menjadi satu satunya bank yang berpartisipasi dalam Program Desa Nabung Saham yang bertujuan agar masyarakat di pedesaan melek terhadap investasi di instrumen saham. Komitmen Bank BRI terhadap pemberdayaan UMKM terlihat dari portofolio penyaluran kredit. Per akhir Desember 2017, BRI menyalurkan kredit sebesar Rp739,3 triliun dengan 73,5% diantaranya disalurkan ke segmen UMKM. Dengan demikian UMKM menjadi penyokong utama kinerja BRI sehingga mampu mencetak laba sebesar 29,04 triliun di sepanjang 2017. Pencapaian ini menjadikan BRI sebagai Bank pencetak laba terbesar di Indonesia selama 13 tahun berturut-turut, Laporan tahunan BRI (2017).

Bank BRI, berkewajiban memberikan literasi keuangan kepada masyarakat atau lembaga ekonomi desa seperti BUMDes atau BUMdes Bersama, khususnya dalam pemberian informasi mengenai pengajuan pinjaman dan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan untuk memperoleh Kupedes BRI. Literasi keuangan yang dilaksanakan oleh BRI kepada masyarakat, diharapkan dapat membentuk sinergi kemitraan strategis khususnya bagi masyarakat yang telah "*bankable*" untuk menjadi agen BRILink BRI. Bahkan, BRI berkomitmen akan melakukan pendampingan dan sosialisasi terhadap tata cara dan proses pendirian BUMDes dan/atau BUMDes Bersama dengan mempertimbangkan kebutuhan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. BRI akan menyediakan layanan perbankan satu pintu untuk mendukung tata kelola administrasi dan manajemen rekening kas desa dan unit usaha BUMDes.,(mataramnews.com. 2018).

BRI berkomitmen memperluas akses keuangan yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat di seluruh penjuru negeri, baik melalui jaringan konvensional maupun jaringan non konvensional. BRI merupakan bank pertama yang memperkenalkan teknologi perbankan di pedesaan. Jangkauan unit kerja BRI hingga pelosok negeri dan menyediakan jaringan di remote area, BRI menjangkau yang tak terjangkau dan melayani yang tak terlayani. BRI menjadi pionir sebagai penjaga kedaulatan Rupiah di perbatasan dengan melayani masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan memberikan akses keuangan kepada nelayan di kawasan pesisir.

Sebagai bank dengan core business UMKM, BRI turut mendorong transformasi UMKM di era digital. Ini sesuai dengan visi Presiden RI Joko Widodo, yang menargetkan Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020, Laporan tahunan BRI (2017).

Di tahun 2017, BRI meluncurkan *marketplace* digital yang diberi nama Indonesia Mall. Indonesia Mall merupakan website yang digagas BRI agar mendorong pelaku UMKM menjadi *technopreneurs*, atau dengan kata lain *go digital*. Melalui terobosan ini, BRI ingin memfasilitasi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya sehingga semakin meningkatkan exposure produk UMKM lokal. Sebanyak 279.750 agen BRILink membantu masyarakat di seluruh pelosok negeri melakukan transaksi perbankan sebagaimana mereka bertransaksi di kantor cabang. BRI juga memfasilitasi kemunculan start up dengan menggelar *Coworking Festival 2017* untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif. Inklusi Keuangan Ke Seluruh Pelosok Negeri Melalui Agen BRILink, kini masyarakat di daerah remote sudah dapat menikmati layanan perbankan tanpa kehadiran cabang konvensional. Sebanyak 279.750 agen BRILink membantu masyarakat di seluruh pelosok negeri melakukan transaksi perbankan sebagaimana mereka bertransaksi di kantor cabang. Keberadaan agen BRILink ini turut memberi andil untuk mencapai indeks inklusi keuangan di tahun 2019. Bank BRI terus mendorong pemberdayaan dan peningkatan derajat pengusaha UMKM di Indonesia. Salah satu caranya dengan merintis penyediaan fasilitas *Kartu Co Branding* kepada para pedagang di pasar agar gencar bertransaksi non tunai.

Melalui pemanfaatan kartu *cobranding* BRI, diharapkan mereka terbiasa mendapatkan layanan jasa perbankan yang cepat, nyaman, modern, dan pada akhirnya tergabung kedalam cash-less society, yang mampu mengoptimalkan teknologi online dalam mendukung pengembangan usaha, Laporan tahunan BRI (2017).



BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam pasal Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2014, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78 – 81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial

bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) (2012).

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2014 jo. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa serta PP No. 72 tahun 2015 tentang Desa. Dalam UU No. 32 tahun 2014 juncto UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.² Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagaimana yang berbunyi: Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, Permendagri 39/ BUMDes (2010).

Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, UU No 6 Tentang Desa (2014).

BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara

ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, (PP No 72 Tahun 2015).

Keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan adanya BUMDes, adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran, Ngesti (2012).

Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah: sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan kehadiran BUMDes ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Tetapi mengingat BUMDes masih termasuk hal baru dalam keberadaannya, maka tak pelak di

dalam praktek, beberapa kendala muncul justru terkait dalam proses pembentukannya. Pertama, belum ada dasar hukum yang memayungi tentang keberadaan BUMDes di desa. Walaupun sebenarnya secara tersirat semangat untuk melembagakan BUMDes telah diamanatkan dan dipayungi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Bab VII bagian Kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka berdasarkan pasal 78 PP 72 Tahun 2015 tentang Desa, dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Di Provinsi Jawa tengah BUMDes terbaik ada di Klaten desa Ponggok Kabupaten Klaten (<http://jateng.tribunnews.com>). BUMDes Tirta Mandiri yang didirikan pada Desember 2014 sebagai penguatan ekonomi desa Ponggok. Sebagai salah satu desa di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, desa Ponggok dinilai mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya terutama di bidang pariwisata. Usaha yang dimiliki oleh Desa Ponggok di antaranya wisata alam (Umbul Ponggok), kolam perikanan, pengelolaan air bersih, kios kuliner, dan perkreditan. Salah satu wisata unggulan di desa Ponggok adalah Pemandian Umbul Ponggok. Atas dasar

tersebut, kemudian didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri pada tanggal 15 Desember 2014. Umbul ponggok merupakan salah satu objek wisata andalan di Desa Ponggok yang dimanfaatkan sebagai pemandian, kolam renang, dan sebagainya. Selain itu wisata umbul Ponggok mempunyai fasilitas yang cukup lengkap sehingga jumlah wisatawan selalu meningkat dari tahun ke tahun sehingga tidak heran jika keuntungan yang didapat BUMDes Tirta Mandiri hingga jutaan rupiah. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah upaya BUMDes Tirta Mandiri sendiri dalam pengelolaan dan pelestarian wisata air di Umbul Ponggok yang dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU No. 7 tahun 2014 tentang Sumber Daya Air. Keuntungan yang di dapat dari wisata air tersebut seharusnya mampu untuk mempertahankan sumber daya air itu sendiri agar dalam pengelolaannya tetap terjaga kebersihannya.

BUMDes Tirta Mandiri tidak hanya mendapat kepercayaan dalam mengelola wahana wisata air Umbul Ponggok, kawasan wisata eks Banyu Mili dan Umbul Besuki, dari usaha tersebut BUMDes memperluas ke usaha-usaha lain dan mengembangkannya hingga sekarang. Dengan modal awal Rp 30 juta Tirta Mandiri bergerak dengan mengelola air bersih, hingga sekarang sudah 210 keluarga yang bergabung dengan BUMDes dari 700 keluarga dengan investasi sekitar Rp 5 juta setiap kepala keluarga sehingga total penyertaan modal dari masyarakat mencapai Rp 1,2 miliar, (Media Indonesia.com. 2018).

Sementara BUMDes terbaik di Kabupaten Jepara, berada di desa Karanggondang (<https://jepara.go.id/2018>). BUMDes Karanggondang mengelola usaha keuangan semacam koperasi untuk mengembangkan perekonomian warga desa dengan pinjaman lunak serta pengelolaan pasar Tawar yang menjadi Icon pasar rakyat dengan menjual berbagai hasil laut yang segar dari nelayan di pantai Pailus dan Blebak. Keberadaan UMKM di desa Karanggondang diharapkan dapat memberi kontribusi yang cukup baik terhadap upaya penanggulangan masalah-masalah yang sering dihadapi seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan segala aspek yang tidak baik. Peranan UMKM di desa Karanggondang yang dikaitkan oleh pemerintah hendaknya harus dapat mengurangi tingkat pengangguran yang semakin bertambah dari tiap tahun, menanggulangi kemiskinan dengan membantu masyarakat yang kurang mampu dan pemerataan pendapat yang dapat memperbaiki kehidupan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam keuangan khususnya.

Masalah yang dihadapi para pelaku sektor Usaha Mikro di desa Karanggondang antara lain sulitnya UMKM mengakses modal, tidak dapat kredit dari bank, tidak bisa menyampaikan profil usaha dalam bentuk laporan usahanya. Untuk memenuhi modal yang diperlukan, para pelaku sektor usaha mikro dapat memperoleh pinjaman dari bank. Dengan adanya program kredit dari BUMdes Karanggondang diharapkan dapat mempermudah pengusaha dalam mendapatkan kredit. Dengan cara ini pelaku usaha mikro dapat terbantu dalam masalah permodalan dan pinjaman, serta akan memperkuat

usaha mikro dalam mengembangkan usahanya, sehingga akan meningkatkan pendapatan usaha mikro itu sendiri. Sektor usaha mikro masih menghadapi kendala terutama berkisar pada keterbatasan modal. Permodalan tersebut memiliki peranan yang sangat strategis dalam pengembangan Usaha Mikro di desa Karanggondang. Apabila modal kecil atau terbatas maka produktivitas Usaha Mikro akan kecil atau terbatas pula sehingga omzet usaha Mikro akan kurang atau menurun sehingga akan memperkecil pendapatan UMKM.

Banyak penelitian mengenai BUMDes seperti penelitian Valentine (2016) yang membuktikan bahwa peran pemerintah Desa Bumiaji dalam mengelola BUMDes yakni sebagai pembentukan dan pengembangan BUMDes, sebagai mediator pelatihan dan motivator terhadap terbentuknya pengurus dan organisasi BUMDes serta sebagai pengawasan. Sedangkan program BUMDES di Desa Bumiaji Kota Batu seperti terbentuknya Badan Kesejahteraan Desa (BKD), Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPAM) dan Badan Pengelola Gelora Arjuna (BAPEGAR).

Sementara penelitian Amelia (2014) menyatakan adanya peluang demokratisasi pada tingkat desa seharusnya pula membawa dampak positif bagi desa untuk membangun inisiatif dan keinginan memajukan desa. Inisiatif itu harus melihat pada banyak aspek meliputi pelayanan, demokratisasi dan partisipasi serta hal yang lebih penting adalah meningkatkan potensi ekonomi desa. Peningkatan perekonomian desa hendaknya dimulai dengan memberikan legalitas yang tepat sehingga BUMDes benar-benar membuktikan perannya sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan

Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa secara utuh dan menyeluruh.

Alasan pemilihan judul ini karena BUMDes selain diharapkan menjadi sumber pendapatan asli desa, juga menjadi tempat masyarakat untuk mendapatkan kemudahan dalam berusaha terutama bagi UMKM. Selama ini kredit perbankan yang mengalir untuk sektor UMKM dirasa masih kurang karena sulitnya akses yang salah satunya adalah ketatnya persyaratan dalam kredit termasuk masalah jaminan. Akan tetapi dengan adanya kerjasama melalui BUMDes dalam bentuk pendampingan oleh BRI kepada BUMDes Karanggondang, diharapkan BUMDes dapat menambah aset desa dan memajukan perekonomian desa.

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Terkait dengan luasnya lingkup, permasalahan dan waktu serta keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan berkaitan dengan laporan keuangan BUMDes Karanggondang yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh desa, maka penelitian ini dibatasi hanya untuk menganalisis peran BRI terhadap produktifitas BUMDes karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

1.3. Perumusan Masalah

Dengan adanya BUMDes Karanggondang, merupakan jalan alternatif untuk dapat memajukan sektor UMKM di desa. Hal ini menarik untuk dikaji dengan perumusan adalah bagaimana strategi pengembangan BUMDes Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara melalui pendampingan BRI.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis strategi pengembangan BUMDes Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara melalui pendampingan BRI.

1.5. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian tentang perkembangan UMKM setelah mendapatkan kredit adalah sebagai berikut:

1. Bagi BUMDes Karanggondang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan BRI dalam mengambil keputusan untuk pengembangan BUMDes di Karanggondang untuk terus memajukan perekonomian desa serta dapat menambah aset desa.

2. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mempertajam daya analisa serta mengaplikasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah dalam praktek di lapangan.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan BUMDes di kabupaten Jepara

